

288 KELOMPOK PETANI TEMBAKAU TEMANGGUNG DAPAT BANTUAN PUPUK



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/07/bantuan-pupuk.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memberikan bantuan pupuk kepada 288 kelompok petani tembakau pada masa tanam 2024.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan DKPPP Kabupaten Temanggung Sumarno di Temanggung, Selasa, menyampaikan masing-masing kelompok petani mendapatkan bantuan NPK Vertila 1.600 kilogram dan untuk ZA 400 kilogram.

"Kami berharap bantuan pupuk ini bisa menjadi stimulan pada petani di Kabupaten Temanggung pada musim tanam tembakau kali ini, karena kita sadari tembakau ini tidak mendapatkan slot untuk pupuk bersubsidi," katanya.

Oleh karena itu, katanya, dengan adanya bantuan pupuk ini bisa meringankan beban dari petani, khususnya untuk sarana produksi.

"Saat ini posisinya sudah disampaikan ke kelompok petani, nanti aplikasinya sesuai dengan waktu tanam. Ada yang sudah tanam tetapi ada juga yang belum, khususnya untuk daerah tengah dan selatan ini baru proses pembibitan, yaitu daerah Sindoro dan Sumbing baru pembibitan," katanya.

Penjabat Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo menyampaikan bantuan pupuk dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun bantuan pupuk dari pemerintah kabupaten agar dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Hal ini penting kami sampaikan, bantuan ini jangan dijual. Kalau dijual nanti jadi masalah, kalau sudah masuk ke aparaturnya penegak hukum kita yang pusing, 'panjenengan' juga pusing," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta para penerima bantuan pupuk ini tidak menjual pupuk yang sudah diterima karena bentuknya bantuan yang harus digunakan dengan baik.

"Ini saya ingatkan betul, karena penting bagi 'panjenengan' semuanya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan kepada petani. "Terutama petani tembakau karena andalan kita itu tembakau dan kedua kopi," katanya.

Ia berharap tahun ini semua tembakau yang ditanam itu hasilnya bagus sehingga kalau dijualnya juga bagus harganya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/532536/288-kelompok-petani-tembakau-temanggung-dapat-bantuan-pupuk>, "288 Kelompok Petani Tembakau Temanggung Dapat Bantuan Pupuk", tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sd4430432/ratusan-kelompok-petani-tembakau-di-temanggung-dapat-bantuan-pupuk?question-index=>, "Ratusan Kelompok Petani Tembakau di Temanggung Dapat Bantuan Pupuk", tanggal 7 Mei 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684627438/288-kelompok-tani-terima-bantuan-pupuk-pj-bupati-temanggung-hary-agung-prabowo-mewanti-wanti-bantuan-ini-jangan-dijual>, "288 Kelompok Tani Terima Bantuan Pupuk, Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo Mewanti-wanti: Bantuan ini Jangan Dijual", tanggal 7 Mei 2024.
4. <https://halloindo.com/antara/288-kelompok-petani-tembakau-temanggung-dapat-bantuan-pupuk>, "288 kelompok petani tembakau Temanggung dapat bantuan pupuk", tanggal 8 Mei 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Ibid

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi